

## **Mekanisme Perhitungan Penggunaan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan**

**Jihan Khairunnisa**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: [jihankhairunnisa180501@gmail.com](mailto:jihankhairunnisa180501@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received April 10, 2023

Revised April 20, 2023

Accepted Mei 30, 2023

#### **Kata Kunci:**

Mekanisme, Perhitungan Anggaran, Realisasi Belanja

#### **Keywords:**

Mechanisms, Budget Calculations, Expenditure Realization



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Jihan Khairunnisa. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

### **ABSTRAK**

*Kegiatan pengabdian ini membahas perhitungan penggunaan anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dilaksanakan dalam bentuk magang selama kurang lebih satu bulan. Metode pelaksanaan adalah observasi dan wawancara tentang mekanisme kerja perhitungan penggunaan anggaran dan realisasi belanjanya. Hasilnya bahwa kegiatan magang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat pengetahuan seputar dinas perkebunan dan mekanisme kerja perhitungan penggunaan Anggaran dan realisasinya.*

### **ABSTRACT**

This service activity discusses the calculation of budget use and actual expenditure at the South Sumatra Province Plantation Service. It is carried out in the form of an internship for approximately one month. The implementation method is observation and interviews regarding the working mechanism for calculating budget use and actual expenditure. The result is that this internship activity is very beneficial for students. Students gain knowledge about the plantation service and the working mechanism for calculating budget usage and

its realization.

## **Pendahuluan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam Pasal 23 Ayat (1) mengamanatkan bahwa usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. Dalam kawasan tersebut seluruh sub system agribisnis perkebunan distimulasi untuk berkembang secara optimal, sinergis dan terintegrasi, sehingga petani pekebun dan para pelaku usaha dalam kawasan tersebut dapat memperoleh manfaat dan nilai tambah yang maksimal secara berkelanjutan.

Pembangunan sub sektor perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan produksi dan kualitas hasil, perkembangan dan pertumbuhan kawasan dan ekonomi di wilayah sentra perkebunan/pedesaan yang sekaligus positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini menggambarkan bahwa peranan pembangunan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi pedesaan dan pertumbuhan kawasan baru yang berbasis komoditas perkebunan.

Reorientasi Pembangunan Perkebunan Nasional terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dipedesaan, hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya produksi dan

produktifitas, perluasan areal, penguatan hak atas tanah, pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Mengingat di era globalisasi tuntutan pasar dunia menjadi demikian penting untuk diperhatikan, bukan saja mutu produk yang dihasilkan melainkan pembangunan berwawasan lingkungan justru menjadi perhatian Negara-negara konsumen, oleh karenanya dalam merencanakan pemanfaatan ruang suatu kawasan perlu dikaji dan ditelaah beberapa aspek baik teknis maupun non teknis dari kawasan yang bersangkutan. Hal ini sangat penting, mengingat dalam penataan kawasan akan dilakukan alokasi serta penetapan suatu kegiatan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang ditimbulkan oleh elemen-elemen kegiatan dalam suatu proses yang kontinyu, seperti pertumbuhan fisik kawasan sering kali tidak seimbang dengan perkembangan kawasan adanya perbedaan daya tampung fisik kawasan yang terbatas dengan pertumbuhan kawasan itu sendiri.

### **Metode Pengabdian**

Kegiatan pengabdian ini berupa magang yang diadakan oleh Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 22 September 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal, pengalaman kerja, dan kesiapan semua, khususnya setika selesai melaksanakan studi dan terjun ke dunia kerja. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, wawancara atau interview di tempat magang dengan berbagai stakeholders, dan menyerap berbagai pengalaman secara langsung, dan hasilnya di buat dalam bentuk laporan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Selayang Pandang Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan**

Pelaksanaan kegiatan magang menghasilkan pengetahuan dan pengalaman tentang seputar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/ badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan Pembangunan Perkebunan tersebut dapat dilihat dalam periode tiga tahun terakhir ini luas areal perkebunan rakyat terus meningkat dengan rincian luas areal Tahun 2012 seluas 2.429.132 ha, tahun 2013 menjadi 2.542.801 Ha, dan pada tahun 2014 seluas 2.620.992 ha, umumnya komoditi yang diusahakan tanaman karet, kelapa sawit, Kopi, Kelapa dan komoditi harapan lainnya. Produksi perkebunan pun mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir dengan rincian total produksi perkebunan Tahun 2012 sebesar 3.561.990 Ton, Tahun 2013 sebesar 3.845.982 Ton, dan tahun 2014 sebesar 4.114.840 Ton,. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Analis Tim Statistik Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan merupakan Produsen Karet Terbesar di Indonesia di ikuti oleh Sumatera Utara dan Riau. Dari total produksi karet di Indonesia, 20 % produksi tersebut dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Laju produksi ini masih bisa ditingkatkan karena produktivitas komoditi di Sumatera selatan masih dibawa rata-rata. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil ini disebabkan belum sepenuhnya di terapkan sistem budidaya yang baik (Good Agriculture

---

## Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 7-12

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

---

Practices/GAP), penggunaan bibit unggul yang masih rendah, belum sepenuhnya penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit serta rendahnya teknik penyadapan dan pengolahan hasil. Disisi lain banyaknya tanaman karet yang tua/rusak yang perlu segera diremajakan mencapai 143.192 Ha sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman karet.

Sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tugas pokok Dinas perkebunan :

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas  
Dekonsentrasi di bidang perkebunan

Serta mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b) Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perkebunan;
- c) Melaksanakan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d) Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- e) Pembinaan, pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f) Penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g) Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
- h) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada dan mempunyai fungsi :
  - a) Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan mutu benih perkebunan
  - b) Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan
  - c) Penyiapan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih berdasarkan standar teknis yang ada.
  - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu

tanaman pengadaan dan perbanyakkan serta penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati dan mempunyai fungsi :

- Pengidentifikasian, penginventarisasian dan penetapan status organisme pengganggu tanaman
- Pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- Pengadaan, perbanyakkan dan penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati.
- Pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat organisme pengganggu tanaman
- Pengembangan metode pengendalian secara terpadu organisme pengganggu tanaman
- Pelatihan dan kursus bagi petugas dan kontak tani serta regu proteksi tanaman.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 telah ditetapkan program kerja atau yang dikenal dengan RKT/ Rencana Kerja Tahunan dan telah disinkronkan dengan Rencana Strategis Daerah serta RPJM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 serta diaplikasikan dalam Permendagri No.13 tahun 2005.

## 2. Mekanisme Kegiatan Dinas Perkebunan

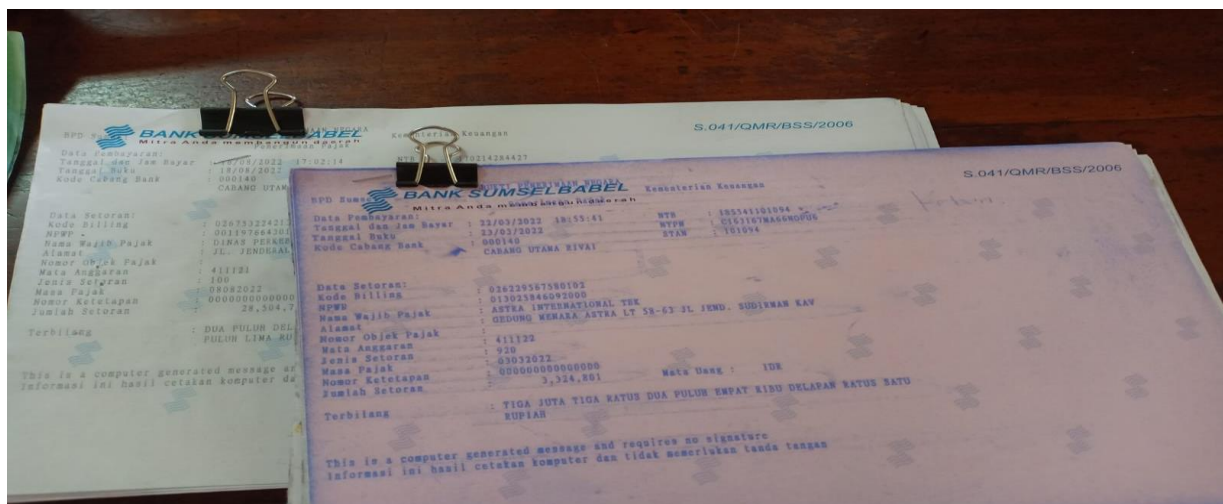
Kegiatan berikutnya adalah membantu pelaksanaan kerja pada Dinas Perkebunan seperti melaksanakan mekanisme Kegiatan Dinas Perkebunan meliputi :

- Membuat Surat Perjalanan Dinas

Mengerjakan pembuatan surat perjalanan dinas untuk surat izin perjalanan karyawan untuk dinas luar. sehingga surat tersebut sebagai pelengkap keterangan agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan efisien sesuai jadwal yang di tentukan .

- Menyusun Surat Pembayaran pajak dan SP2D

Berikut ini hasil menyusun kwintasi pembayaran pajak Dan SP2D.



# Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 7-12

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

## c. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Sampai dengan Realisasi

Dari bahan usulan pekerjaan yang diajukan sesuai keperluan penyusunan bahan – bahan penelitian untuk menyusun RKA . Rencana anggaran kemudian di ajukan . Setelah di setuju DPPKAD menerbitkan DPA dan petikan DPA di serahkan ke perangkat kerja untuk dilaksanakan perkerjaan nya berdasarkan pada yang tertuang DPA.

## d. Laporan Realisasi Belanja

Berikut ini di sajikan Laporan Realisasi Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2020 dan 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI	TOTAL	LSDH (URAIAN)
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.1	Belanja Pegawai		16,749,803,200.00	0.00	15,013,251,536.60	15,013,251,536.60	(1,736,551,663.40)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		14,518,854,200.00	0.00	12,811,578,736.60	12,811,578,736.60	(1,707,275,463.40)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		8,673,677,000.00	0.00	8,171,496,177.00	8,171,496,177.00	(802,180,823.00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		4,962,217,000.00	0.00	4,672,767,427.00	4,672,767,427.00	(289,449,573.00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		3,826,068,000.00	0.00	3,647,545,300.00	3,647,545,300.00	(178,522,700.00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Jatah ASN		4,962,217,000.00	0.00	3,647,545,300.00	3,647,545,300.00	(1,314,671,700.00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jatah PNS		3,826,068,000.00	0.00	3,647,545,300.00	3,647,545,300.00	(178,522,700.00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		3,826,068,000.00	0.00	3,647,545,300.00	3,647,545,300.00	(178,522,700.00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		103,711,000.00	0.00	97,175,000.00	97,175,000.00	(6,536,000.00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		103,711,000.00	0.00	97,175,000.00	97,175,000.00	(6,536,000.00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		216,600,000.00	0.00	209,076,540.00	209,076,540.00	(7,523,460.00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN		216,600,000.00	0.00	209,076,540.00	209,076,540.00	(7,523,460.00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS		31,012,000.00	0.00	17,316,360.00	17,316,360.00	(13,695,640.00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		31,012,000.00	0.00	17,316,360.00	17,316,360.00	(13,695,640.00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		129,000.00	0.00	45,147.00	45,147.00	(128,854.00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		129,000.00	0.00	45,147.00	45,147.00	(128,854.00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
5.1.1.01.12	Belanja Buran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
5.1.1.01.12.0001	Belanja Buran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(25,000,000.00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		3,565,460,000.00	0.00	3,380,168,750.00	3,380,168,750.00	(185,291,250.00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		3,565,460,000.00	0.00	3,380,168,750.00	3,380,168,750.00	(185,291,250.00)
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		3,565,460,000.00	0.00	3,380,168,750.00	3,380,168,750.00	(185,291,250.00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		TOTAL	SISWA
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI		
		146.000.000,00	0,00	118.560.000,00	118.560.000,00	(27.440.000,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	146.000.000,00	0,00	118.560.000,00	118.560.000,00	(27.440.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	140.640.000,00	0,00	113.200.000,00	113.200.000,00	(27.440.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.360.000,00	0,00	4.640.082.559,60	4.640.082.559,60	(1.205.094.846,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.845.177.200,00	0,00	1.805.240.160,00	1.805.240.160,00	(58.676.514,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.863.916.674,00	0,00	1.805.240.160,00	1.805.240.160,00	(471.200,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.863.916.674,00	0,00	1.805.240.160,00	1.805.240.160,00	(471.200,00)
5.1.2.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	317.760.000,00	0,00	317.288.800,00	317.288.800,00	(471.200,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Lain-lain	40.000.000,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)
5.1.2.01.01.0008	Belanja Suku Cadang/Suku Cadang Alat Angkutan	50.000.000,00	0,00	49.977.200,00	49.977.200,00	(22.800,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.520.000,00	0,00	84.427.399,00	84.427.399,00	(92.601,00)
5.1.2.01.01.0013	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.448.474,00	0,00	151.023.561,00	151.023.561,00	(8.424.913,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	(1.518.000,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan	72.308.000,00	0,00	71.040.000,00	71.040.000,00	(14.068.000,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	20.000.000,00	0,00	5.932.000,00	5.932.000,00	(1.804.000,00)
5.1.2.01.01.0028	Dokumen/Administrasi Tenda	2.784.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	(117.500,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	66.290.000,00	0,00	66.172.500,00	66.172.500,00	(52.600,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	30.000.000,00	0,00	29.947.400,00	29.947.400,00	(7.510.000,00)
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	853.006.200,00	0,00	845.496.200,00	845.496.200,00	(24.154.400,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapi	69.810.000,00	0,00	45.655.600,00	45.655.600,00	(20.500,00)
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	89.979.500,00	0,00	89.979.500,00	89.979.500,00	(20.000,00)
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakai Pelatihan Kerja	7.500.000,00	0,00	7.480.000,00	7.480.000,00	(980.653.768,40)
5.1.2.02	Belanja Jasa Kantor	2.329.220.000,00	0,00	1.348.566.231,60	1.348.566.231,60	(977.817.717,40)
5.1.2.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.259.220.000,00	0,00	1.281.402.282,60	1.281.402.282,60	0,00
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(880.000.000,00)
5.1.2.02.01.0006	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	880.000.000,00	0,00	621.900.000,00	621.900.000,00	(1.320.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Ahli	623.220.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	(5.600.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000,00	0,00	119.637.000,00	119.637.000,00	(30.363.000,00)
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	0,00	119.976.876,60	119.976.876,60	(23.123,40)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Tagihan Telepon	120.000.000,00	0,00	39.471.896,00	39.471.896,00	(5.528.100,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Air	45.000.000,00	0,00	31.860.168,00	31.860.168,00	(3.139.832,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Listrik	35.000.000,00	0,00	175.817.867,00	175.817.867,00	(9.182.100,00)
5.1.2.02.01.0061		185.000.000,00	0,00			

## Simpulan

Dari kegiatan magang yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Dalam pelaksanaan magang mahasiswa mendapat wawasan tentang bagaimana Dinas Perkebunan melakukan kegiatan dibidang keuangan, bidang fungsional maupun bidang yang lain. Pengambilan data dan penginputan data. *Kedua*, dalam pelaksanaan magang mahasiswa mendapatkan kegiatan magang yang positif karena dengan kegiatan ini mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam dunia kerja dan memberikan pengalaman kerja dalam suasana dan kondisi di dunia kerja dalam Dinas Perkebunan. *Ketiga*, dalam pelaksanaan magang mahasiswa dapat belajar lebih teliti, profesional, bertanggung jawab, serta ulet dalam melakukan tugas di Dinas Perkebunan

## Daftar Pustaka

<https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisisi-anggaran/>

Data dari Dinas Perkebunan Privinsi Sumatera Selatan. <http://disbun.sumselfprov.go.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.